

***Decision Making Process* dalam Kebijakan Israel (Studi Kasus Penolakan Israel Terhadap Resolusi DK PBB 2334)**

Muhammad Abdillah Ihsan

*Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Interdisciplinary Islamic Studies, Kajian Timur*

Tengah Email : Rajasawardhana206@gmail.com

Abstrak

Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh negara anggota memiliki konsekuensi diterapkan sanksi terhadap pelanggarannya. Berkaitan dengan itu, terdapat penolakan terhadap Resolusi DK PBB Nomor 2334 Tahun 2016 oleh Israel sebagai bagian dari putusan yang dikeluarkan dalam resolusi. Tulisan ini mencoba menelaah kasus penolakan tersebut menggunakan teori *Decision Making Process* (DMP) dalam kaitannya dengan Rasionalitas Pengambilan Keputusan, Organisasi Pengambilan Keputusan, dan Faktor Individu Pengambil Keputusan. Melalui kacamata DMP, secara eksternal dapat dilihat bahwa penolakan tersebut memiliki rasionalitas yang tinggi berkaitan dengan kepentingan nasional Israel. Dengan superioritas dan dukungan Amerika Serikat (AS) serta sikap yang diambil oleh negara lain, tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap keputusan Israel ini. Secara internal, komposisi dan kedudukan pengampu kebijakan di Israel sendiri berwujud sebuah formasi yang sangat solid di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, hal ini memungkinkan lahirnya satu keputusan bulat sebagai satu kebijakan negara meskipun bertentangan dengan resolusi internasional.

Kata Kunci: *Decision Making Process*, Kebijakan Israel, Resolusi DK PBB 2334.

Abstract

The United Nations Security Council Resolution which has binding legal force for all member countries has the consequences of imposing sanctions on violations. In this regard, there is a rejection of the UNSC Resolution 2334 of 2016 by Israel as part of the decision issued in the resolution. This paper tries to examine the case of rejection using the Decision Making Process (DMP) theory in relation to the Decision Making Rationality, Decision Making Organization, and Individual Decision Making Factors. Through the DMP's glasses, externally it can be seen that the rejection has a high rationality with regard to Israel's national interests. With the superiority and support of the United States (US) and the attitude taken by other countries, it will not have any influence on this Israeli decision. Internally, the composition and position of policy makers in Israel itself is in the form of a very solid formation under the leadership of Prime Minister (PM) Benjamin Netanyahu, this allows the presence of a unanimous decision as a state policy even though it contradicts international resolution.

Keywords: Decision Making Process, Israel Policy, UNSC Resolution 2334

A. Pendahuluan

Israel adalah sebuah negara yang hadir sebagai rumah umat Yahudi dan berangkat pada semangat Zionisme yang berasal dari tulisan Theodor Herzl - tokoh Zionisme dan peletak konsep negara Yahudi - dengan judul *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) (1896), semangat zionisme juga banyak dipengaruhi oleh tulisan Vladimir Jabotinsky dalam *The Iron Wall* (1923) serta Leon Pinsker dalam *Auto Emancipation* (1882).

Menurut Garaudy (1996), Israel merupakan negara yang

menerapkan gaya kolonialisme dan rasisme dalam sikap politiknya. Sejak berdirinya pada tahun 1948 di tanah Palestina, konflik terus terjadi antara Israel dan Palestina. Tulisan ini akan menjabarkan terkait dengan kebijakan Israel dalam menanggapi-kondisi terkait tanah Palestina. Proses dalam perumusan kebijakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan serta signifikansinya.

Tulisan ini akan mengemukakan teori *Decision Making Process* (DMP) dalam melihat fenomena yang hampir selalu tidak rasional

dalam kebijakan-kebijakan Israel terkait dengan pendudukan dan nasib bangsa Palestina. Fokus utamanya terletak pada proses pembuatan kebijakan Israel dalam kaitannya dengan pendudukan dan pemukiman di tanah Palestina, termasuk di dalamnya status Kota Jerusalem.

Penggunaan teori DMP dimaksudkan untuk membaca situasi dan kondisi terkait dengan kebijakan dan sikap politik Israel dalam konteks tersebut. Penulis mencoba mengedepankan beberapa hal yang dalam teori DMP penting untuk diperhatikan. Beberapa hal tersebut adalah Rasionalitas Pengambilan Keputusan, Organisasi Pengambilan Keputusan, Faktor Individu Pengambil Keputusan meliputi motivasi, karakteristik, pemikiran serta psikologi pengambilan keputusan.

Permasalahan yang menjadi titik tolak dalam bahasan ini adalah sikap penolakan Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) no. 2334 tahun 2016 yang menyatakan tidak sahnya pendudukan dan pembangunan pemukiman orang-orang Yahudi di tanah Palestina yang diokupasi setelah perang tahun 1967. (United Nations Security Council Resolution 2334). Sebagaimana

diketahui, resolusi DK PBB sebagai satu kesepakatan internasional yang dikeluarkan DK PBB memiliki kekuatan hukum mengikat (*legal binding force*) dan memaksa (*imperatif*). Hal ini berlaku bagi seluruh negara anggota PBB dan juga negara bukan anggota PBB sebagaimana termaktub dalam Pasal 25, Pasal 2 ayat (6), dan Pasal 49 Piagam PBB. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran terhadap resolusi DK PBB ini dapat berupa sanksi militer maupun non-militer sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Meski demikian, penolakan Israel terhadap resolusi DK PBB 2334 tahun 2016 ini merupakan suatu realita yang ada dilapangan.

Pertanyaan risetnya adalah rasionalisasi seperti apa yang digunakan Israel dalam pertimbangan- kebijakan tersebut? Faktor apa saja yang memberikan pengaruh dalam prosesnya?

BBC Indonesia melaporkan (24/12/2016) resolusi DK PBB nomor 2334 yang lolos tanpa veto dari AS pada tahun 2016 diindahkan begitu saja oleh Israel. (Lihat juga timesofisrael.com, 23/12/2016). Resolusi tersebut menyatakan pendudukan dan pembangunan pemukiman di wilayah yang diduduki Israel setelah perang tahun 1967,

merupakan sebuah tindakan ilegal dan sangat menyalahi dengan aturan internasional, bahkan tindakan tersebut melanggar Konvensi Jenewa.

Reaksi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk menanggapi resolusi tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh New York Times (26/12/2016) adalah penolakan dan pengingkaran dengan tetap melangsungkan perluasan-pembangunan dan pendudukan. Di kota Jerusalem, pemerintah Israel pertama-tama akan menyetujui 600 unit rumah di bagian timur kota yang didominasi Palestina dari target sekitar 5.600 rumah baru. (The New York Times, 26/12/2016)

Penolakan Israel terhadap resolusi tersebut bisa dilihat melalui kacamata *national interest* Israel sendiri yang secara nyata menurut Garaudy (1996) memiliki tipikal kolonialis dan terorisme negara. Bahkan atas dasar kepentingan nasional ini pulalah tawaran Kwartet Internasional terhadap upaya perdamaian Israel-Palestina dalam Peta Jalan Damai mendapatkan tanggapan keras dan sinis oleh pemerintah Israel saat itu.

Teori *Decision Making* (DM) memusatkan perhatian utama

pada situasi atau masalah yang berkembang, teori ini melihat sebuah kasus secara mikro dan fokus utamanya merupakan sesuatu yang jauh lebih kecil daripada keseluruhan sistem politik. (Dougherty dan Pfaltzgraff: 1971). Berikutnya penulis akan membahas terkait rasionalisasi yang diterapkan pemerintah Israel sebagai landasan kebijakan yang diambil.

B. Rasionalisasi Reaksi dan Kebijakan

Konsep kepentingan nasional dijadikan tolak ukur untuk merumuskan rasionalisasi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Israel dalam kaitannya penolakan terhadap resolusi DK PBB 2334.

Menurut Donald E. Nuechterlein, empat poin penting dalam menjelaskan konstruk kepentingan nasional adalah sebagai berikut; 1) Kepentingan Pertahanan, 2) Kepentingan Ekonomi, 3) Kepentingan Ketertiban Dunia, dan 4) Kepentingan Ideologi. (Akbar: 2013).

Penulis berpendapat kepentingan pertahanan atau keamanan negara dan kepentingan ideologi adalah dua hal yang paling mendasari kebijakan yang dikeluarkan Israel.

Kepentingan ideologi Israel tidak keluar dari spirit gerakan zionisme dan klaim historis serta teologis tentang *Eretz Israel* (Israel Raya), tanah Palestina dipilih sebagai tempat berdirinya Negara Yahudi berdasarkan klaim historis dimana pada masa lalu *Bani Israil* adalah penguasa dan tuan di tanah tersebut, yaitu tanah Kanaan. Klaim teologis tentang tanah yang dijanjikan didasarkan pada kutipan dalam Kitab Perjanjian Lama Bab Genesis 15: 18. “*Pada hari ini Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim melalui firman “untuk keturunanmu Aku berikan tanah ini, dari Sungai Mesir hingga Sungai Eufrat”*. Bangsa Israel mengklaim diri mereka sebagai pewaris yang paling berhak atas tanah sepanjang Sungai Mesir hingga Sungai Eufrat, membentang melewati garis demarkasi negara-negara modern mulai dari Sinai-Mesir, Israel, Palestina, Jordania, bagian selatan Syiria, dan bagian selatan Lebanon. (Husaini: 2004).

Mengenai tanah yang direbut dari bangsa Palestina, Jabotinsky mengatakan “tidak akan ada pembahasan tentang rekonsiliasi sukarela antara kita dengan orang-orang Arab. Tidak untuk sekarang dan tidak untuk di masa akan datang... coba kita temukan satu contoh dimana kolonisasi sebuah

negeri terjadi dengan persetujuan penduduk asli”. Dalam Manifesto Partai Likud pada tahun 1973 tertulis “*the right of the jewish people to Eretz Yisrael (great Israel) is eternal and indisputable*”. (Husaini: 2004).

Kepentingan nasional Israel lainnya adalah urusan keamanan yaitu kelangsungan keberadaan negara Israel. Secara geografis Israel dikelilingi oleh negara-negara Arab yang mayoritas muslim dan memiliki resistensi terhadap Israel. Dengan menempati dataran rendah hampir di semua wilayahnya, Israel sangat riskan dan mudah untuk diserang melalui segala penjuru dataran tinggi negara-negara tetangganya. Oleh karenanya Israel wajib untuk memiliki kekuatan pertahanan di atas kemampuan negara tetangganya.

Banyak di antara pemimpin Israel berpikir bahwa batas-batas tahun 1948 tidak termasuk wilayah yang cukup untuk sebuah negara yang layak bagi Israel, apalagi bagi mereka yang menginginkan keseluruhan wilayah Palestina (*Eretz Israel*). Kesempatan untuk mendapatkan tanah tambahan datang sebagai hasil dari perang tahun 1967. (Sniegoski: 2008, 46). Berdasarkan keyakinan ini dan hasil kemenangan dalam perang, mereka

berkeyakinan tanah yang mereka duduki saat ini adalah sepenuhnya hak mereka yang telah mereka rebut kembali.

Sejak perang 1967, isu utama dalam politik Israel adalah apa yang harus dilakukan dengan wilayah yang ditaklukkan dan penduduk Palestina. Konvensi Jenewa keempat, yang diratifikasi pada tahun 1949, telah secara tegas melarang deportasi warga sipil di bawah pendudukan. (Sniegoski: 2008, 47).

Muncul beberapa pertanyaan terkait dengan rasionalitas yang digunakan oleh pengambil keputusan di Israel diantaranya adalah; bagaimana pembuat kebijakan melihat situasi permasalahan tersebut? Atas dasar apa mereka merumuskan kebijakan nasional mereka?

Mengutip Charles Lerche, Dougherty dan Pfaltzgraff (1971) mencatat bahwa para pengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan hati-hati tiga faktor ; (1) pola kekuatan dalam situasi tertentu, termasuk yang mungkin dikendalikan oleh satu negara dan yang tidak dapat dikendalikan; (2) kebijakan yang ditempuh oleh negara lain yang terlibat dalam situasi tersebut; dan (3) kemampuan- negara DM untuk

melaksanakan berbagai kebijakan berdasarkan konteks situasional total.

Mengikuti pola tersebut, rasionalisasi dalam penolakan Israel terhadap resolusi DK PBB yang dimaksud dapat dilihat melalui beberapa penjabaran berikut:

Pertama, pola kekuatan Israel dalam situasi dimana konflik ini sedang berlangsung. Israel memiliki superioritas dibandingkan dengan negara lain yang juga terlibat dalam kondisi tersebut, terlebih terhadap Otoritas Palestina.

Dari sisi ekonomi, Israel salah satu negara paling maju di Asia Barat Daya dalam pembangunan ekonomi dan industri, menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia dan Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia, Israel menempati posisi ke-3 di kawasan. Pada 2007, Amerika Serikat (AS) menyetujui bantuan dana sebesar 30 miliar USD kepada Israel untuk sepuluh tahun berikutnya. Untuk Produk Domestik Bruto (PDB), Israel menduduki peringkat ke-39 di dunia pada 2009. Israel memiliki peringkat pembangunan manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Arab. Komoditas ekspor utama Israel adalah buah-buahan,

sayur-sayuran, obat-obatan, piranti lunak, bahan-bahan kimia, bahan bakar fosil, bahan-bahan mentah, teknologi, peralatan militer, serta intan. (Akbar: 2013, 37-38)

Kekuatan militer yang dimiliki Israel juga adalah yang terbesar dan terancang di kawasan. Sebagian besar PDB Israel dibelanjakan untuk keperluan pertahanan. Statistik mencatat, Israel menganggarkan belanja pengembangan militernya sebesar 9.110.000.000 USD pertahun. Israel satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, senjata konvensional yang canggih, senjata pemusnah masal berupa senjata biologi dan kimia. (Akbar: 2013, 37-38). Meskipun secara geografis Israel terlihat rentan, namun dengan superioritas kekuatan, Israel dapat menjamin keamanan negaranya.

Pada bulan September 2016, Pemerintahan Obama menyetujui sebuah kesepakatan bantuan militer untuk Israel sebesar 38 miliar USD selama sepuluh tahun, kesepakatan terbesar yang pernah ada. Israel terus membeli sub- marinir yang canggih dari Jerman dengan harga diskon, sehingga menurunkan biaya menjadi 2 miliar dolar AS. (Scheindlin: 2017, 5).

Faktor AS sebagai faktor eksternal yang signifikan memeng-

aruhi dunia perpolitikan Israel, terlebih terkait dengan kebijakan luar negeri. AS dan Israel memiliki hubungan yang sangat erat, AS adalah kolaborator yang menjanjikan dengan bantuan-bantuan baik secara politik seperti misalnya beberapa veto AS terhadap resolusi-resolusi PBB memberikan keleluasaan bagi Israel untuk melakukan apapun. Bantuan materil juga diberikan, diantaranya berupa bantuan ekonomi, pinjaman dana khusus dengan pajak minimum, dan kerjasama persenjataan militer.

Keberlangsungan kebertahanan dan superioritas Israel dalam bidang militer tidak terlepas dari campur tangan AS, tanpa sokongan senjata dari Washington, Israel akan kehilangan keuntungan kualitatif. Tanpa tunjangan ekonomi dari Negeri Paman Sam, Israel akan kolap. Kebergantungan Israel menempatkan negara ini hanya bisa bertindak atas persetujuan AS (Schoenman : 2013). Faktor lainnya adalah kuatnya lobi Yahudi melalui *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan di AS, hal ini memberikan *impact* bahwa sikap politik AS, terlebih di Timur Tengah akan selalu pro-Israel. (Husaini: 2004)

Kedua, kebijakan yang ditempuh oleh negara lain dalam konteks tersebut sangat bervariasi. AS di bawah pemerintahan Barack Obama (2009-2017) adalah satu-satunya negara di DK PBB yang abstain dalam perhitungan suara, AS memilih berdiam diri untuk melakukan perlindungan terhadap Israel. AS di bawah kepemimpinan Donald Trump bersikap sebaliknya, Kamis, 7 Desember 2017 dunia menjadi heboh menyaksikan pengumuman yang dikeluarkan oleh Presiden Trump dengan menyampaikan pengakuan AS terhadap kota Jerusalem sebagai ibukota resmi negara Israel. (The Guardian, 07/12/2017)

Beberapa hari setelahnya AS melalui duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memveto resolusi DK PBB yang menyayangkan dan mendorong pemerintah AS untuk menarik pernyataan resminya atas Jerusalem sebagai ibukota Israel. Resolusi tersebut dikecam dengan menggambarkannya sebagai sebuah penghinaan yang tidak akan terlupakan. (The Guardian, 19/12/2017)

Otoritas dan penduduk Palestina, Dunia Arab dan Muslim, bahkan seluruh dunia tidak akan mampu atau mau berbuat banyak terkait hal tersebut. Mesir, Jordania,

Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab memiliki hubungan baik dengan Israel secara diam-diam (Kramer: 2016, 52), mereka tidak akan menukar kepentingan negaranya “hanya” untuk kepentingan Palestina. Semuanya hanya akan melontarkan kecaman yang tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap Israel dan AS. Sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia (22/12/2017) Resolusi Majelis Umum (MU) PBB yang disahkan pada Kamis, 21/12/2017 terkait status Kota Jerusalem dengan hasil 128 setuju, 8 tidak setuju, dan 35 *abstain*, hampir dapat dipastikan akan menjadi angin lalu bagi Israel. Resolusi yang berisi desakan kepada Presiden Trump untuk menarik keputusannya soal Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dikomentari oleh Perdana Menteri Netanyahu sebagai hal yang tidak masuk akal dan Sidang Majelis Umum itu disebutnya sebagai “teater kaum absurd”.

Ketiga, kemampuan Israel dalam mengimplementasikan kebijakannya. Di tanah Palestina yang menjadi wilayah pendudukan, Israel hampir menguasai seluruh aspek kehidupan, mulai dari banyaknya pemukiman Yahudi yang saling bertaut dari satu lokasi dengan lokasi yang lain, aturan militernya

di wilayah pendudukan yang sangat mendeskreditkan penduduk Palestina, keberadaan pasukan keamanan yang arogan, dan bahkan masyarakat Yahudi itu sendiri yang seringkali bersikap tidak ramah.

Kemampuan untuk mendominasi dan menghegemoni ini secara eksternal sangat terkait dengan superioritas kekuatan militer dan ekonominya, dan lobi AIPAC, serta respon dari negara lain yang terlibat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dan secara internal, penduduk Palestina tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan, bahkan termasuk Otoritas Palestina dan organisasi Hamas. Terlebih Israel memiliki sejarah panjang dalam hal penolakan terhadap resolusi PBB yang akan merugikan kepentingan nasionalnya. Maka sangat rasional jika kebijakan yang bertentangan dengan Resolusi DK PBB itu bisa dikeluarkan oleh Israel.

Beberapa ahli teori tradisional berpendapat selalu sulit untuk membedakan kepentingan nasional dari kepentingan subnasional atau dari kepentingan pembuat keputusan itu sendiri, untuk itu penulis merasa perlu untuk melihat lebih dalam terhadap kelompok kepentingan yang ada di balik kepentingan nasional yang Israel bicarakan di depan publik

dengan menjabarkan organisasi pengambilan keputusan.

C. Organisasi Pengambilan Keputusan

Dalam menjabarkan Organisasi Pengambilan Keputusan maka perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik pemerintahan dan politik di Israel. Sebagaimana diketahui, Israel memiliki sistem politik yang sangat terbuka, sistem demokrasi parlementer yang dianut memberikan ruang kompetisi- dan dialektika yang luas. Kepala pemerintahan Israel adalah seorang perdana menteri yang ditetapkan dalam parlemen, sedangkan untuk kepala negara, Israel memiliki seorang presiden dengan kekuasaan terbatas dan hanya bersifat seremonial.

Israel termasuk dalam negara dengan sistem politik terbuka, dengan sejumlah indikasi: adanya pemilihan reguler yang bersifat kompetitif, legalisasi dua atau lebih organisasi yang bertujuan menggantikan kepemimpinan dalam pemerintahan, tingkat toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok otonom dalam politik, dan adanya kesepakatan terhadap aturan-aturan konstitusional bagi penguasa pemerintahan. Meskipun Israel

menyebut dirinya sebagai negara Yahudi akan tetapi keseluruhan perangkat dan pemangku kebijakannya lebih didominasi dengan pola-pola politik yang sekuler (Husaini: 2004)

Dalam pemilu legislatif Israel terakhir yang dilaksanakan pada 17 Maret 2015, sedikitnya melibatkan dua puluh lima partai yang turut berpartisipasi dan pada akhirnya sepuluh partai mendapatkan jatah kursi dalam Knesset - sebutan parlemen di Israel. Hasil pemilu menempatkan Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu sebagai pemenang. Berbeda dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2013 yang menempatkan koalisi partai revisionis zionisme sayap kanan Likud dan Yisrael Beiteinu memuncaki perolehan suara, pada 2015 pemenang kontestasi, yakni partai Likud yang mendapatkan 30 kursi dalam Knesset harus bersusah payah membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul partai-partai sayap kanan yang relatif kecil untuk mencapai standar minimum 50%+1 kursi koalisi dalam pemerintahan. (Lihat www.voaindonesia.com, 18/03/2015, www.cnnindonesia.com 18/03/2015)

Pada saat-saat terakhir batas waktu pembentukan pemerintahan,

Netanyahu mengumumkan bentuk koalisi yang mungkin akan sangat rapuh ke depannya, sebagaimana dilaporkan Vox (5/6/2015), Likud membentuk pemerintahan dengan menggandeng partai-partai sayap kanan seperti The Jewish Home, United Torah Judaism, dan Shas, juga partai tengah Kulanu sebagai rekan dalam pemerintahan sehingga mendapatkan 61 kursi dalam koalisinya dari total 120 kursi.

Proposisi minimum yang dipegang oleh pemerintah Israel sangat memungkinkan terjadinya riak-riak bahkan gelombang kepentingan yang akan menggoyahkan posisi dan keberlangsungan legalitas pemerintahan. Sedikit saja ketidakstabilan dalam memposisikan rekan koalisinya akan berpengaruh besar pada kepemimpinan Netanyahu.

Sangat jelas terlihat kekuatan pemerintah Israel sepenuhnya didukung oleh kekuatan partai-partai yang berideologi zionis-kanan. Choudhary (2017) menulis bahwa blok kanan politik Israel berawal dari Gerakan Revisionis yang dipimpin oleh Vladimir Jabotinsky pada tahun 1925. Berpandangan konservatif dan nasionalisme yang sempit, kelompok ini memiliki gerakan dan idealisme yang berseberangan Zionisme Sosialis. Versi Jabotinsky

tentang Zionisme ini berfokus pada penciptaan Kerajaan Israel dengan mayoritas orang-orang Yahudi di kedua sisi sungai Yordan. Choudhary (2017) juga mengutip Sprinzak yang mengatakan para pendiri gerakan revisionis menyadari kebajikan demokrasi liberal, namun meragukan nilai mereka dalam perjuangan nasional. Likud dibentuk dan berdiri dengan latar belakang ini pada bulan September 1973 oleh blok Herut-Liberal.

Selain berpegang teguh pada ideologi zionis -revisionis, Likud selalu menjadi pelopor gerakan ekonomi bebas yang sangat meminimalkan peran negara. Pendapat mereka, ekonomi yang diliberalisasi lebih baik daripada ekonomi sosialis dan ekonomi yang dikendalikan negara. Ide dasar dari partai tersebut adalah bahwa kewiraswastaan individu akan menciptakan pertumbuhan, sehingga memenuhi manfaat sosial. Kebijakan ekonomi pemerintah Likud akan berfokus pada pertumbuhan yang cepat, defisit yang rendah, pengurangan pengeluaran pemerintah, reformasi struktur perpajakan dan inflasi terkendali (Choudhary: 2017).

Berada di luar koalisi pemenang pemilu, partai Zionist Union - yang berwatak sosialis demokrasi dan percaya akan konsep *Two State*

Solution sebagai jawaban konflik panjang Israel-Palestina - di bawah pimpinan Isaac Herzog yang sekaligus menjadi pimpinan oposisi bersama partai- partai kiri lainnya sangat mungkin memainkan peran dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan baik oleh pemerintah maupun oleh parlemen.

Dua kelompok dominan dalam perpolitikan Israel ini dapat digambarkan sebagai kelompok yang memiliki peran besar dalam proses pengambilan kebijakan negara. Kelompok partai keagamaan dan sentris yang masuk dalam koalisi pemerintah juga akan memberikan warna tersendiri dalam prosesnya.

Partai Buruh merupakan pilar penting dari blok politik di Israel. Meskipun secara ideologis dan strategi pergerakan, blok Partai Buruh dapat ditempatkan di sisi kiri dan kanan dalam politik partai Israel. (Choudhary: 2017, 121). Blok buruh yang dipimpin oleh partai sosialis tidak konsisten dalam konstruk ideologi dan kadang memiliki ambiguitas terhadap dukungan pemilihnya. Ini adalah hasil dari berbagai penyesuaian dan penataan kembali, inklusi dan pengecualian, dan pemisahan dan penggabungan. Akibatnya, konglomerasi kekuatan politik dalam blok sosialis Partai Buruh kurang lebih tidak koheren

dan rentan terhadap pertikaian. (Choudhary: 2017, 122)

Choudhary (2017: 124) menjelaskan bahwa Don Peretz dan Gideon Doron menemukan bahwa Partai Buruh pada pertengahan tahun 1990-an memiliki struktur, orientasi, dan dampak yang berbeda pada masyarakat dibanding pada tahun 1970an. Ia mendefinisikan Partai Buruh sebagai partai yang tidak memiliki konsistensi terhadap orientasi tunggal dalam agenda nasional. Tujuan paling penting dari partai tersebut untuk membuat para pendukungnya tetap bersatu untuk melawan kebijakan dan aturan yang berasal dari Partai Likud.

Untuk mengidentifikasi pemangku kebijakan yang memiliki peran sangat besar dalam kasus pendudukan dan pemukiman di tanah Palestina dapat dilihat posisi paling berpengaruh di dalamnya. Selain perdana menteri itu sendiri, jabatan menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan dalam kasus Israel juga melibatkan pimpinan oposisi sebagai agen lain yang memiliki peran dalam prosesnya.

Jabatan menteri luar negeri sekaligus juga dipegang oleh Benjamin Netanyahu, aturan di Israel memungkinkan hal demikian. Posisi strategis menteri pertahan

yang sebelumnya berada dalam kuasa penuh partai Likud melalui Moshe Ya'alon, sejak bergabungnya partai Yisrael Beiteinu pada tahun 2016 dalam kabinet, menempatkan Avigdor Lieberman, pimpinan partai nasionalis revisionis-zionis, Yisrael Beiteinu. Hal ini semakin menguatkan posisi Netanyahu dan pemerintahannya, memberikan dampak sulitnya kebijakan yang diambil untuk disangkal legalitasnya.

D. Faktor Individu Pengambil Keputusan

Ada juga kecenderungan untuk mengidentifikasi sebuah kasus bahwa dalam proses DM mungkin terdapat bias terhadap unsur-unsur rasional dengan faktor nonrasional, irasional atau suplementasional (Dougherty dan Pfaltzgraff: 1971).

Faktor yang tidak rasional biasanya- dapat dilihat melalui komponen- motivasi, karakteristik, pemikiran dan psikologi dari pengambil keputusan (Dougherty dan Pfaltzgraff: 1971), oleh sebab itu perlu disebutkan individu mana memiliki kuasa yang cukup luas dalam proses pengambilan keputusan. Penulis berkeyakinan individu yang paling signifikan perannya adalah pejabat kursi perdana menteri sebagai pucuk

dari segala kebijakan, dalam hal ini berarti Benjamin Netanyahu.

Faktor-faktor individu yang akan penulis paparkan diharapkan dapat membantu untuk melihat peran individu tersebut dalam menghasilkan kebijakan Israel dalam kaitannya dengan pendudukan dan pembangunan pemukiman di Palestina.

Berangkat dari masa lalu, Benjamin Netanyahu dilahirkan pada tahun 1949 di Tel Aviv, di- besarkan di Jerusalem. Masa pen- didikannya dihabiskan sepenuhnya- di AS. Ia kembali ke Israel pada tahun 1967 dan terdaftar sebagai prajurit dan perwira di Sayeret Matkal, unit pasukan khusus Israel Defense Force (IDF) sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Netanyahu terlibat dalam Perang Yom Kippur dan usai perang ia dipromosikan sebagai kapten. Karir politik Netanyahu adalah yang paling luar biasa setelah David Ben-Gurion, berbagai jabatan penting di pemerintahan Israel pernah diembannya, diantaranya; tahun 1982-1984 sebagai Wakil Kepala Misi, Kedutaan Besar Israel di Washington, DC, tahun 1984-1988 Duta Besar Israel untuk PBB, tahun 1988-1991 Deputy Menteri Luar Negeri, tahun 1991-1992 Wakil Menteri di Kantor Perdana Menteri, tahun 1993-1996 dan 2005-2009

Pemimpin Oposisi, tahun 2002-2003 Menteri Luar Negeri, tahun 2003-2005 Menteri Keuangan, dan menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak empat kali pada tahun 1996-1999 dan 2009- sekarang. Netanyahu sepenuhnya terafiliasi dengan Partai Likud dan menjalankan ideologi Likud dalam sikap-sikap politiknya, Netanyahu konsisten didampuk sebagai pimpinan partai. (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: 2017)

Karakteristik pribadi Netanyahu berangkat dari ideologi zionisme dan kapitalisme liberal. Untuk melanggengkan kekuasaannya ia juga melakukan kontrol yang sangat kuat terhadap pers dan sebisa mungkin membatasi pergerakan kritis dari pers dan blok kiri sebagai saingan politik (Scheindlin: 2017). Ia juga menggunakan populisme politik untuk memperkuat bloknya dan melemahkan blok lainnya (Benn: 2016). Netanyahu telah mengangkat lima jabatan menteri sejak pemilihan 2015, yang memberinya tingkat kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah memungkinkan beberapa kebijakan kontroversialnya. (Scheindlin: 2017, 11)

Sebuah wawancara bersama Majalah Foreign Affairs, Tzivi Livni – mantan anggota Likud

dan pimpinan Partai Hatnua yang berkoalisi dengan kelompok buruh - mengatakan : dalam demokrasi, Anda perlu memiliki sistem peradilan yang kuat. Anda memerlukan kebebasan berbicara, Anda memerlukan seni, dan Anda memerlukan kebebasan pers. Semua hal ini sekarang sedang terancam. Kita perlu mendorong gagasan bahwa demokrasi adalah masalah nilai bukan hanya tentang mayoritas. (Tepperman: 2016, 10)

Motivasi yang dilihat dari sosok Netanyahu bisa dikatakan untuk melanjutkan dan melengkapinya perjuangan Manachim Begin – pendiri Likud dan mantan Perdana Menteri Israel- yang belum tercapai untuk mereformasi Israel dan mendepak blok kiri.

Livni juga mengatakan Netanyahu dan orang-orang di pemerintahannya mengatakan bahwa sikap asing tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat sepenuhnya didasarkan pada diri kita sendiri: dunia ini anti-Semit, jadi mereka akan membenci kita apa pun yang kita lakukan. (Tepperman: 2016, 15)

Benjamin Netanyahu melihat demokrasi identik dengan superioritas mayoritas yang tidak dapat dikontrol dan tidak mempunyai batas seperti *judicial review*

atau perlindungan minoritas. Pandangan mayoritas blok kanan di Israel, Israel adalah sebuah negara Yahudi dan negara demokratis. Oleh karenanya hanya orang Yahudi yang bisa menikmati hak penuh, sementara orang-orang non-Yahudi tidak. Meski agak ekstrem, keyakinan ini sekarang banyak dipegang, survei opini publik Pew yang dipublikasikan pada bulan Maret 2016 menemukan bahwa 79% orang Israel Yahudi mendukung “perlakuan istimewa” untuk orang Yahudi. (Benn: 2016, 16)

Masyarakat Israel telah berubah selama kepemimpinan Netanyahu. Terdapat situasi politik dan demografi yang dimainkan. Publik terlihat lebih nasionalis, lebih xenofobia atau etnosentris, dan secara eksplisit tidak permasalahan tren tersebut, agak berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Terlepas dari peran Netanyahu dalam mengobarkan dinamika ini, dia tentu telah memperdalam dan mendorong tren tersebut dan memanfaatkannya sebagai elemen integral untuk kesuksesan politiknya. Dia juga mengasah gaya kepemimpinan yang jelas, mengedepankan kepemimpinan terpusat dengan kontrol personal atas pertumbuhan sektor masyarakat. (Scheindlin: 2017, 12).

Sementara solusi dua negara dalam kasus Israel-Palestina telah diambil dalam perundingan, Israel di bawah pemerintahan Netanyahu terus melakukan pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Kelompok hak asasi manusia dan aktivis yang berani mengkritik pendudukan dan mengekspos pelanggaran akan mendapat kecaman oleh otoritas di Israel. Pemerintah telah berusaha untuk mengeluarkan undang-undang baru yang membatasi aktivitas mereka. Hubungan Arab-Yahudi di negara tersebut telah mencapai titik terendah, dan masyarakat Israel telah menghancurkan suku-suku konstituennya. Netanyahu memanfaatkan isu kesukuan tersebut- untuk meningkatkan elektabilitasnya, untuk mencapai tujuannya mengganti elite Israel hanya dengan yang selaras dengan filosofinya. Kondisi yang demikian telah berkembang sejak masa perdana menteri sebelumnya. Sesuatu yang cukup sederhana untuk dimengerti adalah, seseorang harus melihat lebih jauh ke belakang dalam sejarah Israel. : untuk apa negara ini didirikan pada 1948. (Benn: 2016, 16)

E. Simpulan

Melalui kacamata DMP dapat dilihat bahwa penolakan

Israel terhadap resolusi DK PBB no. 2334 terlihat sangat rasional mengingat kepentingan nasional Israel seperti kepentingan ideologi dan kepentingan keamanan masih terus diyakini dan diperjuangkan. Memiliki kekuatan superior dibandingkan dengan negara lain baik dari sisi ekonomi, sumber daya militer, dan dukungan eksternal AS meneguhkan posisi Israel bahwa mereka memang memiliki superioritas tersendiri. Sikap yang diambil oleh negara lain seperti Palestina, Dunia Arab dan Muslim, dan lain-lain tidak akan memberikan dampak apapun terhadap keputusan Israel, terlebih ketika negara super-power AS kembali berada dibelakang Isreal. Dengan dominasi dan hegemoninya, Isreal mampu untuk mengimplementasikan kebijakannya dengan cukup mudah, mereka hanya akan mendapat “sedikit” kecaman dan mungkin juga perlawanan kecil dari kelompok-kelompok Islam.

Di dalam negeri sendiri pemerintahan Israel dikuasai oleh Partai Likud dan kelompok sayap kanan revisionis di bawah Netanyahu yang sepenuhnya bisa memobilisasi pemerintahan dan parlemen di Israel. Dengan ideologi yang sama terkait dengan *Eretz Israel* dan tanah Palestina yang

mereka yakini menjadi hak mereka, kebijakan apapun dengan cepat akan dilegalisasikan, terlebih terkait dengan isu pendudukan, stabilitas di internal pemerintahan akan terjamin dengan baik. Semua posisi startegis yang berhubungan dengan pendudukan dan pembangunan pemukiman dipegang sepenuhnya oleh koalisi sayap kanan. Kelompok kiri- sosialis-demokratis yang pada masa lalu pernah menguasai perpolitikan Israel, hari ini berada dalam tekanan yang sangat kuat dari pemerintah dan kelompok sayap kanan, oposisi sangat sulit bergerak dan mendapatkan tempat, terlebih dengan politik populisme dan kontrol terhadap kebebasan pers dan kelompok kiri yang dilakukan pemerintah. Kontrol yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk melancarkan pergerakan politik dan memudahkan mengeluarkan dan menerapkan berbagai kebijakan.

Pengalaman di masa lalu, ketika Perdana Menteri aktif dalam IDF dan terlibat Perang Yom Kippur pada 1973 akan memberikan kesan bahwa Netanyahu memiliki sifat yang keras dan tegas khas militer. Karir politik Netanyahu dengan berbagai jabatan penting di pemerintahan Israel yang pernah diembannya memperlihatkan bahwa sosok Netanyahu adalah

sosok yang sangat berkarakter. Karakteristik pribadi Netanyahu berangkat dari ideologi zionisme dan kapitalisme liberal, dengan latar belakang demikian itu, bukan sesuatu yang janggal jika ia memiliki resistensi terhadap resolusi DK PBB tersebut. Motivasi yang dilihat dari sosok Netanyahu adalah bahwa ia sepenuhnya berangkat dari orientasi Partai Likud, orientasi ini selaras dengan apa yang dimulai oleh Manachim Begin untuk mereformasi Israel dan mendepak blok kiri di masa lalu.

Dari beberapa hal di atas, penulis berkesimpulan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu adalah kebijakan yang paling "Israel", sesuai dengan semangat masa lalu sejak negara ini berdiri dan sepenuhnya diproyeksikan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Partai Likud dan kelompok sayap kanan, yang juga mengklaim kelompok mereka sebagai representasi mayoritas masyarakat Israel.

Daftar Pustaka

- Akbar, Angga Aulia. *Mengungkap Hubungan Dagang Indonesia-Israel*. Tangerang: Marjin Kiri, 2013.
- Benn, Aluf. *"The Struggle For Israel: The End of the Old Israel"*. New

- York City: Foreign Affairs, Vol. 95 No. 4 Juli/Agustus 2016.
- Choudhary, Sunil K., *The Changing Face Of Parties And Party Systems A Study Of Israel And India* Singapore: Springer Nature/Palgrave Macmillan, 2017.
- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*. Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1971.
- Garaudy, Roger. *Zionisme Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Husaini, Adian. *Pragmatisme Dalam Politik Zionisme Israel*. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004.
- Kramer, Martin. "The Struggle For Israel: Israel and the Post-American Middle East" . New York City: Foreign Affairs, Vol. 95 No. 4 Juli/Agustus 2016.
- Scheindlin, Dahlia. *Ten Years with Netanyahu*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2017.
- Schoenman, Ralph. *Di Balik Sejarah Zionisme*. Terj. Joko S. Kahar. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2013.
- Sniegoski, Stephen J., *The Transparent Cabal : The Neoconservative Agenda, War In The Middle East, And The National Interest Of Israel*. Norfolk, Virginia: Enigma Editions, 2008.
- Tepperman, Jonathan. "The Struggle For Israel: A Conversation With Tzipi Livni". New York City: Foreign Affairs, Vol. 95 No. 4 Juli/Agustus 2016.
- United Nations Security Council. Resolution 2334, 23 Desember 2016.

Fortal Berita

- Armandhanu, Denny. "Hasil Pemilu Terpaut Ketat, Netanyahu Sudah Klaim Menang" (www.cnnindonesia.com, 18/03/2015) Diakses pada 26 Nopember 2018.
- Baker, Peter. "A Defiant Israel Vows To Expand Its Settlements" (www.nytimes.com, 26/12/2016). Diakses pada 25 Desember 2017.
- BBC Indonesia. "Permukiman Yahudi: Israel sebut resolusi DK PBB 'memalukan'" (www.bbc.com, 23/12/2016). Di-akses pada 26 Nopember 2018.
- Beauchamp, Zack. "Benjamin Netanyahu will keep his job — barely, and maybe not for long" (www.vox.com,

- 06/05/2015). Diakses pada 25 Desember 2017.
- Beaumont, Peter. “*US outnumbered 14 to 1 as it vetoes UN vote on status of Jerusalem*” (www.theguardian.com, 19/12/2017). Diakses pada 25 Desember 2017.
- Borger, Julian. dan Peter Beaumont, “*Defiant Donald Trump confirms US will recognise Jerusalem as capital of Israel*” (www.theguardian.com, 07/12/2017). Diakses pada 25 Desember 2017.
- Cortellessa, Eric “*Choosing not to veto, Obama lets anti-settlement resolution pass at UN Security Council*” (www.timesofisrael.com, 23/12/2016). Diakses pada 26 Nopember 2018.
- Suastha, Riva Dessthaniana. “*Delapan Sekutu Amerika Tolak Resolusi PBB soal Yerusalem*” (www.cnnindonesia.com, 22/12/2017). Diakses pada 25 Desember 2017.
- Voaindonesia. “*Partai Netanyahu Menang dalam Pemilu Israel*” (www.voaindonesia.com, 18/03/2015). Diakses pada 26 Nopember 2018.

Situs Website

- Benjamin Netanyahu. (2017, Desember 19). Di *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 08:42, Desember 19, 2017.